
Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

Pemerintah Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat

LOCAL GOVERNMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT

Yenni Istijabatul Mufidah^{1✉}, Yustirania Septiani

Universitas Tidar

✉ yennymufidah33@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas peran pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang mendukung bidang-bidang yang terkait dengan bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, serta politik dan psikologi. Pemberdayaan ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan stimulasi, dorongan dan motivasi bagi individu untuk memiliki keberdayaan atau kekuatan untuk menentukan apa pilihan mereka. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui gambaran bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan pemberdayaan-pemberdayaan yang dilakukan bukan untuk membuat masyarakat tergantung kepada pemerintah dan program-programnya. Namun, tujuan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dan juga menyiapkan masa depan masyarakat dengan berbagai peluang, keahlian, pengetahuan untuk pembangunan kapasitas diri. Pemberdayaan masyarakat berhasil jika masyarakat telah berdaya di berbagai bidang khususnya Pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan juga politik dan psikologi.

Kata kunci: peran pemerintah, pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat

Abstract

This article discusses the role of local government in carrying out certain tasks and functions in community empowerment. Community empowerment that supports fields related to education, economics, social culture, and politics and psychology. This empowerment must be done by the local government to provide stimulation, encouragement and motivation for individuals to have the empowerment or strength to determine what their choices are. This study aims to find a picture of how the role of local government in community empowerment. In this study using qualitative descriptive methods. The results of the study stated that empowerments were not carried out to make the community dependent on the government and its programs. However, the purpose of this empowerment is to increase community resources and also prepare the future of the community with various opportunities, expertise, knowledge for self-capacity building. Community empowerment is successful If the community has been empowered in various fields especially Education, economics, social culture and also politics and psychology.

Keywords: the role of government, local government, community empowerment

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan aparat juga dituntut harus mempunyai peran yang besar untuk memberdayakan masyarakat wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat ini tidak lepas urgensi kebijakan desentralisasi. Pemberdayaan masyarakat ini berawal karena partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pembangunan khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat sendiri, kemiskinan, dan memburuknya lingkungan. Pemberdayaan ini suatu strategi dalam peningkatan kemampuan masyarakat dalam aktualisasi diri.

Pemberdayaan ini mencakup bidang bidang yang berkaitan erat dengan kelangsungan kehidupan masyarakat, seperti pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, psikologi, Pendidikan, sosial dan budaya

Pemberdayaan masyarakat ini sebagai salah satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang telah disusun pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan ini mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama untuk mendukung, mendorong dan memotivasi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan seperti adanya persepsi keliru yang terbentuk di masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan bertahap (Damanik, 2019). *Pertama*, bagaimana agar tercipta suasana serta iklim yang kemudian memungkinkan tumbuhnya potensi masyarakat dan juga memungkinkan potensi yang telah ada kemudian berkembang. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan pemberdayaan ini sebagai upaya untuk mengembangkan, mendorong, dan membangkitkan. *Kedua*, memperkuat potensi melalui Langkah yang nyata. Langkah nyata

yang dimaksud adalah dengan menyediakan sarana dan berbagai input serta pemberian akses kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin berdaya. *Ketiga*, pemberdayaan berarti melindungi atau memberi perlindungan. Dalam pemberdayaan masyarakat sebisa mungkin memperkuat atau menambah daya, jangan sampai yang sudah berdaya menjadi semakin lemah atau yang masih lemah bertambah lemah. Dengan adanya perlindungan diharapkan agar tidak terjadi eksploitasi dan juga persaingan yang tidak seimbang.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tema pembahasan dalam pembangunan masyarakat yang diorientasikan searah dengan paradigma pendekatan pembangunan yang baru. Pendekatan paradigma yang lama bersifat top-down dan mulai diorientasikan agar menuju bottom-up yaitu masyarakat di pedesaan sebagai pusat pembangunan.

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat ada dua yaitu : (1) direktif yaitu pemberdayaan masyarakat dilakukan berdasarkan asumsi pemerintah atau Lembaga non pemerintah. Pemerintah atau Lembaga yang mencari tau tentang kebutuhan masyarakat. Mereka yang menetapkan program sekaligus baik buruknya bagi masyarakat. Jadi yang menjadi dominan adalah Lembaga atau pemerintah; (2) non direktif. Pendekatan ini berarti pemerintah mengasumsikan bahwa masyarakat tahu apa yang dibutuhkan. Pemerintah hanya menggali dan mengembangkan potensi yang telah dimiliki.

Dengan adanya berbagai program yang dicanangkan pemerintah diharapkan meningkatkan kemandirian masyarakat bukan menjadikan masyarakat semakin bergantung pada pemerintah. Upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut beberapa segi: (1) peningkatan kemampuan mengenal atau mengidentifikasi berbagai

persoalan dan juga permasalahan yang nantinya akan menyulitkan kehidupan masyarakat sendiri yang akan diberdayakan. Kemudian setelah mengenal, bagaimana agar masyarakat mau meningkatkan kemampuan yang telah ada (2) kesadaran kelemahan dan potensi yang telah dimiliki.

Menurut Nasikun (2000) dalam (Marzuki, 2016) paradigma pembangunan harus berprinsip bahwa pembangunan pertama-tama harus berawal dari masyarakat. Masyarakat harus berinisiatif untuk kepentingan mereka, dan pemerintah harus memberi peluang dan kesempatan untuk masyarakat agar ikut serta dalam setiap program pembangunan, baik saat perencanaan maupun pelaksanaan, termasuk pemilikan asset infrastruktur. Program pemberdayaan masyarakat harus disusun oleh masyarakat sendiri, menjawab kebutuhan masyarakat dan melibatkan kaum terpinggirkan lain. Selain itu juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, dibangun dengan sumber daya local dan dilakukan berkelanjutan atau terus menerus.

Upaya pemberdayaan masyarakat ini melibatkan segenap komponen masyarakat sendiri, selain itu pimpinan yang mampu menjadi leadear juga penting. Pemberdayaan masyarakat ini sangat penting karena masyarakat sebagai pelaku utama harus mengerti akan potensi mereka dan perlu inovasi untuk menjalankan kegiatan sesuai potensi. Inovasi ini akan menjadi pendorong dalam kegiatan serta solusi pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan daya yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat mampu menghadapi dan mencari solusi dari permasalahan mereka. Tujuan pemberdayaan menurut Somodiningrat (2000) dalam (Sugiri) adalah: (1) peningkatan penerimaan

masyarakat dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menurun;

(2) peningkatan kegiatan sosial ekonomi di pedesaan; (3) peningkatan kemampuan masyarakat dalam kelembagaan.

Diharapkan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencapai tujuan diatas.

Agar pemberdayaan masyarakat sesuai tujuan maka dalam implementasinya melakukan intervensi baik secara mikro yaitu secara individua atau makro yaitu secara kelompok masyarakat, organisasi dan komunitas.

Dari latar belakang diatas permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam berbagai bidang serta berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dan tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui gambaran tentang peran pemerintah daerah dalam berbagai bidang serta berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses pemberdayaan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan berarti memungkinkan, membuat agar mampu. pemberdayaan ini khususnya untuk kelompok masyarakat rentan dan juga kelompok masyarakat yang lemah sehingga dengan memberdayakan masyarakat tersebut memiliki memiliki kekuatan, keberdayaan, kemampuan dan kebebasan. Kebebasan disini bukan hanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, namun juga bebas dari kebodohan dan kelaparan. Pemberdayaan ini sebagai proses dan usaha meningkatkan harkat masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

Pemberdayaan adalah proses untuk berdaya atau proses mendapatkan daya, memiliki daya atau kemampuan dari pihak yang sudah memiliki daya kepada yang belum

atau kurang berdaya (Yohanes, 2015). Proses ini sendiri adalah Tindakan dan Langkah secara sistematis yang mencerminkan tahapan perubahan masyarakat yang belum berdaya atau kurang berdaya. Makna memperoleh berarti dalam mendapatkan daya, kekuatan kemampuan tersebut di inisiasi oleh masyarakat sendiri untuk mencari agar mendapatkannya seperti meminta pada pihak lain, menciptakan, mengusahakan untuk mendapatkan daya, kemampuan serta kekuatan. Sedangkan pemberian merujuk pada inisiatif bukan dari masyarakat yang kurang berdaya. Namun dari pihak yang sudah memiliki daya kemudian mengalihkan, memberikan daya tersebut kepada pihak yang belum memiliki daya contohnya dari pemerintah kepada masyarakat.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan memang sangat penting karena dalam pemberdayaan karena diharapkan pemerintah memberikan dotongan, bantuan, upaya dan intervensi sehingga masyarakat akan semakin berdaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa kajian literatur dengan pendekatan kualitatif.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian berupa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat.

Data, Instrumen dan Teknik

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengumpulan studi literatur dan kepustakaan yaitu dengan mendalami artikel

dan literatur serta dokumen lain yang relevan seperti laporan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan analisis deskriptif yaitu menggambarkan situasi yang berlangsung saat ini, hubungan, dan sikap yang ditunjukkan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Birokrasi harusnya memiliki kemampuan mendesain strategi usaha yang mendorong ke pembaharuan dan pembangunan dalam kebijakan dan implementasinya. Kepekaan birokrasi yang harus berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga tuntutan masyarakat dari segala aspek pun turut berkembang. Namun pada kenyataannya sering terjadi inefisiensi yang disebabkan kelembagaan, prosedur ataupun dari aparat sendiri. Peran pemerintah dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat pada kemandirian demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

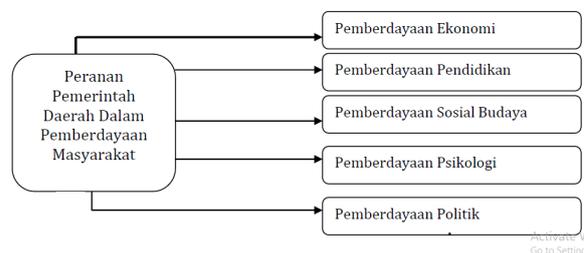
Dengan pemberdayaan masyarakat maka beberapa peran pemerintah beralih ke masyarakat namun bukan berarti hilang sepenuhnya. Dengan pemberdayaan, pemerintah tidak bisa begitu saja menyerahkan kepada masyarakat tugas dan perannya. Karena pemerintah memiliki peran yang semakin luas yaitu mendorong, mengatur dan mengkoordinir masyarakat.

Pemerintah melakukan pelayanan masyarakat bukan bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, mereka lebih mementingkan kepuasan masyarakat terpenuhi bukan memenuhi kemauan birokrat sendiri. Menurut Ndraha (2010) dalam (Wicaksana, 2011), pemerintah memiliki dua peran dasar, yaitu :

Pertama, peran pemberdayaan. Birokrasi mengemban tugasnya dalam pembangunan dan pemerintahan tidak harus mengupayakan sendiri namun mengarahkan pada kombinasi yang optimal antara pemberdayaan dan pelayanan. Pemberdayaan berarti memberi peran kepada masyarakat lapisan bawah ikut serta dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pemerintah bukan lagi sebagai pelayan namun sebagai pemberi petunjuk. Beberapa hal yang mencakup dalam peran ini adalah mengalihkan hak kepemilikan beberapa produk pelayanan publik ke masyarakat dan pemerintah hanya memberi arahan. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Beberapa penyimpangan yang selama ini terjadi adalah aparat yang bekerja melayani birokrat sendiri untuk kepentingan mereka dan tujuan utama mereka melayani masyarakat justru diabaikan. Perubahan orientasi pelayanan perlu dilakukan agar ada peningkatan pelayanan yang awalnya berorientasi untuk kepentingan birokrat beralih ke masyarakat. Dan masyarakat akan punya akses melakukan control dan pengawasan terhadap pemerintahan.

Kedua, peran pelayanan. Pemberdayaan memerlukan semangat dalam melayani masyarakat dan menjadi mitra masyarakat atau kerja sama dengan masyarakat. Itu memerlukan perubahan melalui pembudayaan kode etik baik di pusat maupun di daerah. Semakin banyak pemerintah melakukan tugas pelayanan maka semakin besar peluang gagal atau lemahnya pelayanan. Maka pemerintah memberikan peluang pelayanan kepada swasta dan pemerintah hanya melakukan pengawasan dan menetapkan peraturan. Dengan pengurangan tugas maka kebijakan yang diambil akan lebih cermat dan produktif serta efisien. Pelaksanaan peran pemerintah dalam

pemberdayaan masyarakat tersebut dikatakan berhasil jika masyarakat telah berdaya dari berbagai bidang. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dengan:



Gambar 1. Peran perintah di berbagai bidang

Bidang Pendidikan

Dalam pemberdayaan, pemberdayaan di bidang Pendidikan menjadi kunci. Keberdayaan dalam Pendidikan akan diikuti dengan keberdayaan di bidang lain. Karena dengan keberdayaan Pendidikan pendapatan dalam perekonomian akan meningkat. Kemudian disusul oleh keberdayaan di bidang lain.. Rendahnya pendidikan masyarakat biasanya disebabkan oleh rendahnya perekonomian. Dalam kaitan itu menurut Koswara (2001) dalam (Musa, 2017) menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah (1) meningkatkan pengetahuan rakyat melalui program-program yang di tunjang dengan penyediaan sarana yang memadai untuk pendidikan formal, pemerintah memberikan sarana Pendidikan melalui sekolah-sekolah formal seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan juga pendidikan tinggi; (2) meningkatkan ketrampilan rakyat dengan ditunjang penyediaan sarana pendidikan yang non formal, seperti Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat; (3) mendorong, memotivasi masyarakat agar mau melakukan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan melalui

berbagai dialog juga kampanye bidang pendidikan. Contoh lain pemberdayaan masyarakat bidang Pendidikan adalah dengan didirikannya Kampung Inggris di Pare dan juga Kampung Bahasa di Borobudur.

Pemberdayaan Ekonomi

Kemandirian individu dalam ekonomi memungkinkan masyarakat memendalikan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi oleh adalah : (1) membuat program untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan; (2) memfasilitasi kegiatan perekonomian masyarakat; (3) membantu dalam akses dan permodalan. Selain itu juga melalui mengalihkan hak kepemilikan beberapa produk pelayanan publik ke masyarakat. Menurut Hutomo (2000), beberapa praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu:

1. Memberi bantuan modal
Dalam pemberdayaan ini harus selektif dalam pemberian bantuan agar sesuai dengan target yang akan dicapai yaitu mempercepat laju perkembangan usaha yang dimiliki masyarakat khususnya usaha kecil. Tidak semua masyarakat mempunyai talenta untuk dijadikan wirausaha, bagi masyarakat pekerja dengan pemberian modal ini tidak akan berpengaruh. Selain itu, titik berat dari pemberian modal ini adalah dengan adanya bantuan modal ini masyarakat tidak bergantung pada pemerintah.
2. Bantuan sarana prasarana
Komponen penting dalam perekonomian adalah sarana produksi dan pemasaran. Peran pemerintah disini adalah menyediakan penyediaan sarana produksi. Dengan tersedianya sarana

produksi dan juga sarana pemasaran maka akan meningkatkan penerimaan pengusaha kecil.

3. Bantuan pendampingan
Pendamping bertugas memfasilitasi dalam pembelajaran serta menjadi mediator dalam penguatan kemitraan.
4. Penguatan kelembagaan
Pengelompokan dan juga pengorganisasian dalam ekonomi dimaksudkan untuk memperoleh kemudahan dalam akses permodalan.
5. Penguatan kemitraan
Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi berarti melakukan penguatan Bersama antara Usaha kecil, menengah, dan besar bersama-sama saling mempengaruhi agar berkembang.

Pemberdayaan Sosial Budaya

Dalam bermasyarakat peran dan tanggung jawab yang dimiliki semua orang sama, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah : (1) menyediakan sarana prasarana sosial budaya yang dibutuhkan masyarakat; (2) memberikan dana sosial dan memberi dorongan agar partisipasi masyarakat meningkat dalam berswadaya; (3) pembinaan dalam kegiatan sosial budaya yang berkembang. Termasuk penggalan potensi yang belum ada atau kurang berkembang di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di bidng sosial budaya juga banyak dilakukan berbagai pihak khususnya pemerintah. Contohnya adalah pemerintah memberi dukungan didirikannya sanggar kesenian, pendirian desa wisata, kampung dolanan dan lain lain. Cara pemberdayaan ini dilakukan untuk memajukan daerahnya dan meningkatkan produktifitas dalam masyarakat.

Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan psikologi berarti pemberdayaan dalam cara berpikir masyarakat. Pemberdayaan ini bukan membekali masyarakat dengan kekayaan ataupun kekuasaan namun dengan kesadaran. Masyarakat diarahkan agar mereka sadar dengan kebutuhan mereka dan sadar apa yang mereka inginkan. Interaksi ini ditujukan pada saat proses pengambilan keputusan serta pemilihan kebijakan. Sehingga antara masyarakat dan pemerintah saling menguntungkan dan kebijakan yang diambil tidak salah sasaran. Membangkitkan masyarakat agar berpartisipasi dan berkemauan serta memiliki kerelaan dalam pemberdayaan hanya dapat dilakukan dengan membangun sikap positif. Sikap positif mendasari kemauan agar masyarakat ikut serta dalam pengembangan potensi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat secara psikologi yaitu: (1) pemerintah mengubah cara berpikir masyarakat sesuai perkembangan jaman. Disini pemerintah berperan sebagai agen pembaharu dan menciptakan inovasi, sehingga kinerja pemerintah dapat lebih efektif. (2) pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat akan penerapan nilai demokrasi saat pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah mufakat, gotong royong, menghargai pendapat orang lain, berusaha mencapai tujuan Bersama dengan saling bantu dan bekerja sama.

Pemberdayaan Politik

Inti dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik adalah mengusahakan agar dalam setiap kegiatan politik masyarakat dapat berpeluang, berperan, dan berpartisipasi yang sama. Kegiatan politik ini dapat berupa pengambilan keputusan

bersama, keterlibatan dalam lembaga politik, kesempatan yang sama dalam menyampaikan hak suara, dan pendapat atau aspirasi.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan secara politik yaitu dengan mengusahakan agar masyarakat memiliki peluang yang sama dalam berbagai kegiatan politik. Selain itu juga berupaya mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif.

Dari kelima bidang dalam pemberdayaan masyarakat diatas, faktor kunci terletak pada pemberdayaan masyarakat di bidang Pendidikan dan yang lain sebagai faktor pendukung. Meningkatnya keberdayaan masyarakat di bidang Pendidikan maka akan mengangkat keberdayaan masyarakat di bidang lainnya.

Faktor yang berpengaruh

Tidak semua yang direncanakan akan sesuai, pasti ada kendala-kendala yang akan dihadapi. Kenyataannya ada faktor yang mendukung dan juga menghambat kelancaran kegiatan. Dalam menyikapinya, kita harus dapat memaksimalkan faktor pendukung agar membantu kelancaran pelaksanaan, sedangkan faktor penghambat harus diminimalkan sehingga keberadaannya tidak mengganggu. Begitu pula dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat.

Menurut Supriatna yang dikutip oleh (Sugiri, 2012), dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi faktor pendukung adalah perilaku, dukungan dan fungsi birokrasi pemerintah daerah dan akses masyarakat pada tiap program pemerintah. Selain itu partisipasi masyarakat juga menjadi pendukung yang sangat penting karena masyarakat disini menjadi fokus utama. Dengan keikutsertaan masyarakat sebagai sasaran maka proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat telah memiliki

kapasitas dan juga rasa percaya diri untuk berpartisipasi dan memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Menurut (Watson, 2001) dalam pemberdayaan masyarakat 2 (dua) asal kendala yang menghambat perubahan adalah: (1) dari kepribadian individu dan (2) dari sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Beberapa penghambat dari individu berupa berbagai perbedaan kebiasaan, perbedaan suatu prioritas, persepsi individu yang tidak sependapat, ketergantungan, rasa ego dari individu, perasaan tidak aman dan perasaan tidak percaya diri. Sedangkan yang berasal dari sistem sosial yang berlaku di masyarakat berupa perbedaan norma, sistem dan budaya, kepentingan kelompok, hal yang sakral dan juga penolakan terhadap orang luar.

Sedangkan faktor penghambat menurut Moeljarto(1996) dalam (Sugiri, 2012) faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat adalah struktural pemerintahan, selain itu juga mekanisme pengawasan, monitoring serta evaluasi dan koordinasi antar Lembaga dan juga di dalam Lembaga yang belum ideal dan sesuai aturan. Moeljarto juga mengatakan bahwa pemberdayaan berasal dari 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi distributif serta generatif. Dimensi distributif cenderung menghambat pemberdayaan sedangkan dimensi generative cenderung mendukung.

Dimensi distributif bersifat *zero sum* dan juga sangat kompetitif. Artinya menambah daya satu pihak maka pihak yang memberi akan kehilangan daya. Daya hanya akan berpindah dari satu pihak yaitu pemberi daya ke pihak lain selaku penerima daya. Pada dimensi generatif bersifat *positive sum* atau dengan memberi daya tidak akan menghilangkan bahkan bisa menambah daya si pemberi daya. Artinya jika salah satu diberi

daya maka secara tidak langsung akan memberi daya pada pihak yang lain.

Factor yang menghambat pemberdayaan masyarakat Menurut Rondlinelli dan Cheema dalam (Musa, 2017) adalah keterbatasan akses masyarakat untuk menjangkau atau mengikuti program dan kegiatan pemerintah. Keterbatasan masyarakat ini terjadi karena dua hal yaitu keterbatasan secara geografis maupun sosial. Masyarakat terpencil lebih susah dijangkau dan akhirnya mereka lebih susah mengakses kegiatan ataupun program yang harusnya bisa meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Sedangkan keterasingan sosial yaitu keterasingan yang disebabkan adanya struktur sosial yang berlaku di masyarakat. Mereka yang berasal dari kalangan bawah akan cenderung lebih terbatas dalam mengakses karena ketidakpercayaan diri untuk membaaur dengan kalangan lain, kadang juga diperparah dengan kalangan atas yang biasanya mengucilkan masyarakat kalangan bawah.

SIMPULAN

Peran pemerintah secara umum ada 2 (dua) yaitu peran pemberdayaan dan pelayanan.

Pemberdayaan masyarakat adalah tugas mutlak pemerintah khususnya pemerintah daerah serta perangkatnya terutama dalam pendorongan, perangsangan, dan memotivasi masyarakat agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan pilihan untuk masa depan dan keberlangsungan hidupnya. Pemberdayaan dilakukan bukan untuk membuat masyarakat menjadi bergantung pada pemerintah dan juga program-programnya. Namun pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah dalam ini bertujuan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

juga menyiapkan masyarakat dengan berbagai peningkatan kapasitas diri masyarakat melalui peningkatan sumber daya, kesempatan, keahlian, pengetahuan. Pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil jika masyarakat telah berdaya di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari yaitu pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan juga politik dan psikologi.

Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat paling tidak ada 3 (tiga) yaitu (1) Pendidikan masyarakat, (2) partisipasi masyarakat, dan juga (3) birokrasi pemerintahan. Sedangkan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat ada 4 (empat) yaitu (1) struktural, (2) keterisolasian sosial dan geografis, (3) norma negative masyarakat dan juga (4) persepsi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat. *JURNAL AT-TAGHYIR*, 171.
- dkk, u. (2019). Empowerment Community in Buru Regency. 2070-2075.
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 201.
- Hutomo, M. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Naskah*, 20.
- Marzuki, M. (2016). Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 11.
- Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 107-125.
- noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal ilmiah CIVIS*, 88.
- rohayati, t. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah : Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformative*, 1-17.
- Sahyana, Y. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 157-181.
- Sugiri, L. (n.d.). PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 56-65.
- Umanailo, M. C. (2019). Empowerment Community in Buru Regency. 2070-2075.
- Wicaksana, M. (2011). analisis peran pemerintah.
- Yohanes, B. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya1. *Jurnal Politico*.